

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS BARAT



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat ini merupakan tindak lanjut atas dukungan dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat berarti untuk penyempurnaan dokumen Renstra ini pada masa ini maupun periode yang akan datang.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nias Barat,



Bdn. YANASRI MENI GULO, S.Tr.Keh., MKM
PEMBINA
NIP. 19860515 201001 2 056

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 2025-2029	64
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 2025-2029	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	73
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	172
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	174
BAB V PENUTUP	
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	178
5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber daya Manusia Dinas Kesehatan	48
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Tenaga Medis	49
Tabel 2.3	Data Pusat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Nias Barat Sampai Tahun 2024	50
Tabel 2.4	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Barat Sampai Tahun 2024.....	50
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat, keadaan Tahun 2024.....	52
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat Tahun 2024	53
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran	72
Tabel 2.8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	75
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nias Barat	65
Tabel 3.2	Penahapan Renstra	67
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Resntra PD	68
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat	74
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	133
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	170
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat.....	172
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat.....	174
Tabel 4.6	Formula Perhitungan Indikator	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 1.2	Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan antar wilayah, serta penguatan daya saing regional secara berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pembangunan tidak lagi hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan infrastruktur fisik semata, tetapi telah berkembang menjadi sebuah proses transformasi multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, lingkungan, kesehatan dan teknologi. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat krusial sebagai instrumen pengendali arah kebijakan, pengukur capaian kinerja, serta sarana akuntabilitas kepala daerah kepada publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258, menyebutkan Pembangunan Daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selanjutnya pada Pasal 260, Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana pembangunan Daerah khususnya dibidang disusun dengan prinsip-prinsip yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah Nias Barat dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

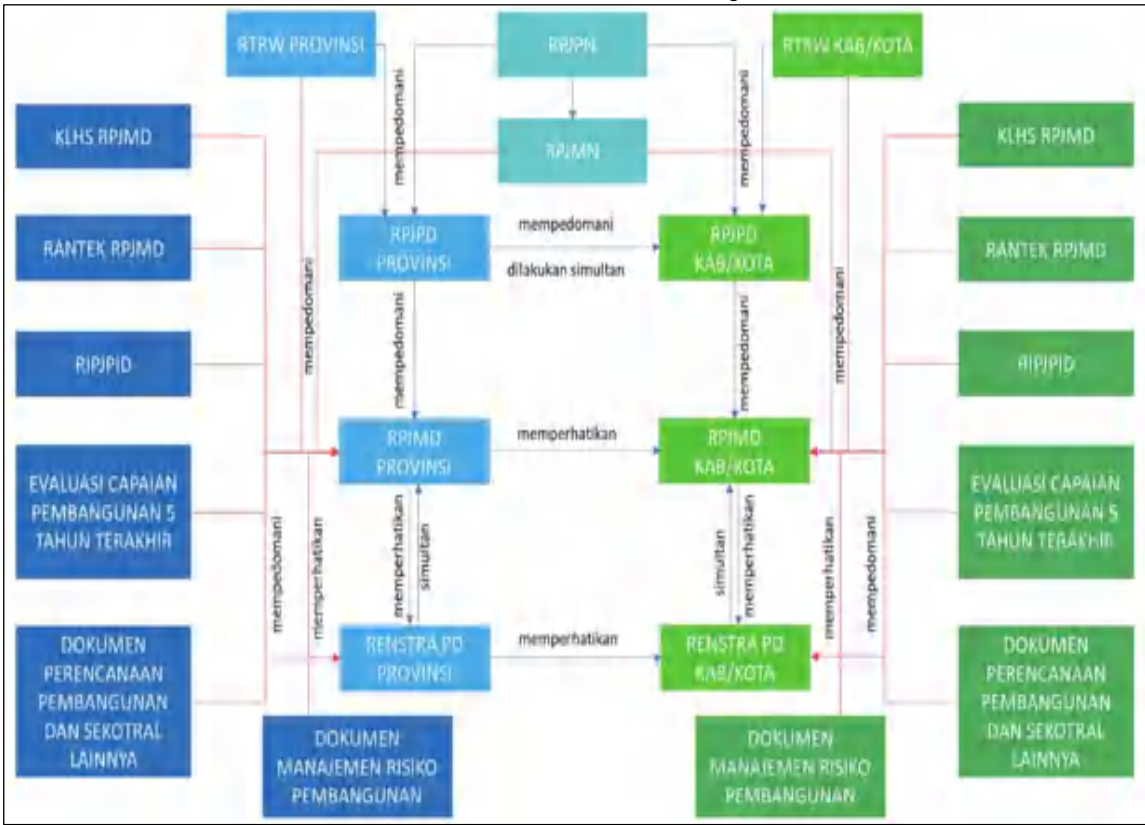
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 27 dan pasal 42 mendefinisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Kabupaten Nias Barat, sebagai salah satu daerah otonom hasil pemekaran di wilayah Kepulauan Nias, tengah menghadapi berbagai tantangan strategis baik dari sisi keterbatasan fiskal, ketertinggalan infrastruktur, dinamika sosial-budaya, hingga potensi kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan suatu dokumen perencanaan yang mampu memberikan arah strategis pembangunan jangka menengah yang responsif, berorientasi pada hasil, dan partisipatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan agenda kerja kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang terintegrasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah

diberi mandat yang luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun di sisi lain, peningkatan kewenangan tersebut menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas publik, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian hasil nyata.

RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan dinamika lokal, aspirasi masyarakat, serta isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi melalui proses musyawarah pembangunan dan kajian teknokratik.

Konteks penyusunan RPJMD ini diperkuat oleh dinamika politik dan administratif daerah, khususnya dengan telah dilantikanya Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si sebagai Bupati dan Bapak Sozisokhi Hia, SH., MM sebagai Wakil Bupati Nias Barat terpilih periode 2025–2030 pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jendral (Purn) Prabowo Subianto. Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, yakni paling lambat tanggal 20 Agustus 2025. Tidak cukup hanya menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk program sektoral, melainkan harus menjadikannya sebagai alat transformasi tata kelola yang sinkron dengan arah kebijakan tata ruang wilayah (RTRW) dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah divalidasi. Oleh karena itu, dokumen RPJMD idealnya menjadi perwujudan dari *goal alignment, policy harmonization*, dan *multi-level governance* yang mengikat secara substansial dan legal-formal. Dengan kata lain, penyusunan RPJMD tidak hanya merupakan mandat yuridis, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengkonsolidasikan agenda pembangunan kepala daerah ke dalam sistem pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 1.2
 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
 Perencanaan Lainnya



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) adalah hierarkis dan saling mendukung: RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi acuan utama dan dasar bagi setiap Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra mereka. Sementara itu, Renstra adalah penjabaran teknis dan operasional dari RPJMD, yang berisi arah kebijakan, program, dan kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 (tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal);
 12. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 (tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan);
 13. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 (Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2025-2045;

20. Peraturan daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2015 Nomor 1).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Nias Barat);
22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2023 Nomor 127);

1.3. Hubungan Antar Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 harus bersinergi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Hubungan antar dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Nias Barat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029;
2. RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029;
3. RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029;
4. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Nias barat Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias barat selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat adalah :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun, mensinkronkan dan mengoptimalkan pencapaian RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029.
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat serta seluruh UPTD Dinas Kesehatan dalam

upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Barat disusun dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang, memuat latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
2. Dasar Hukum, memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Hubungan Antar Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD.
5. Sistematika Penulisan, menguraikan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi jabatan dalam perangkat daerah.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang kelompok yang menjadi sasaran pelayanan perangkat daerah.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dan merupakan pernyataan kondisi real yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Isu Strategis

Menyajikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung dan

dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Format Tabel 3.3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menyajikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029. (Format tabel 4.3 dan table 4.4 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). (Format tabel 4.5 dan tabel 4.6 Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2025)

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar pembentukan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Nias Barat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 adalah:

- Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

A. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan daerah di bidang kesehatan, meliputi: kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Fungsi

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten serta pemberian izin tertentu di bidang kesehatan;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan kesehatan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas kesehatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Program.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat; dan
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional; dan
 - Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Rincian tugas dan fungsi jabatan Di lingkungan dinas kesehatan

A. Kepala Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber

- daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
3. Rincian Tugas Kepala Dinas Kesehatan:
- a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - e. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - f. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang kesehatan;
 - h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesehatan;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja SKPD;
 - k. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
 - l. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;

- m. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
- o. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Perangkat Daerah;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- q. mengkoordinir pengelolaan sistem informasi di bidang kesehatan;
- r. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan di bidang kesehatan;
- s. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas;
- t. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- u. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja dinas;
- v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- w. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- x. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- y. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas Kesehatan

1. Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
2. Sekretaris Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
- i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- j. pemberian usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
 - f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian

- berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas,
 - e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
 - f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
 - h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 Kepala Sub Bagian Program

1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
 - a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
- j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

3. Rincian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- f. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- k. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terkait kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 Kepala Seksi Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

- 1. Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- 2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja,

- dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
- d. melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
 - e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan

- olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
- g. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
 - h. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
 - i. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
 - k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C.2 Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan

pemberdayaan masyarakat.

2. Rincian Tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja seksi;
- o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- i. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular,

- serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - k. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - l. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terkait kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

D.1 Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi.

- 1. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- 2. Rincian Tugas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;

- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama kemitraan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
- l. pelaksanaan administrasi bidang surveilans dan imunisasi;

- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

D.2 Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
 - g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular

- vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama kemitraan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - l. pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai

- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - h. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - i. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - j. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - k. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - l. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten;
 - m. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
 - n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

E.1 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional.

1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan

- integrasi);
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
 - h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
 - i. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);

- k. penyiapan pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
- n. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

E.2 Kepala Seksi Fasilitas, Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

1. Kepala Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.

2. Rincian Tugas Kepala Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- h. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- i. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi layanan pengadaan barang/jasa terkait kegiatan pengadaan/peningkatan fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang

- fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- m. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
3. Rincian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

- c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- g. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan;
- k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Pkrt.

1. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT.
2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

PKRT:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
- d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
- f. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;

- k. pelaksanaan administrasi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
- m. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
2. Rincian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
 - b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
 - d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan

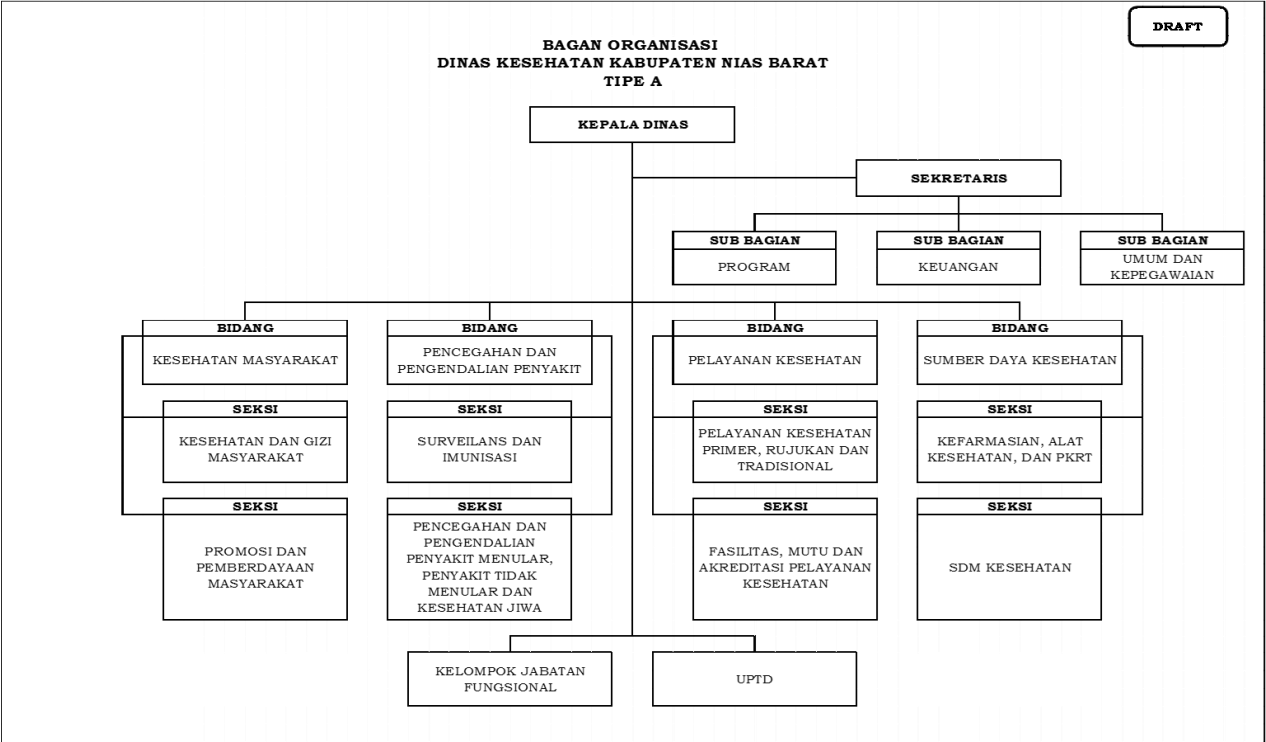
- kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - i. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan;
 - j. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Puskesmas

- a. Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- c. Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- d. Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:

- pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- e. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
 - f. Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
 - g. Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - h. Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
 - i. Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat



H. Mekanisme Koordinasi Internal

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Puskesmas merupakan UPTD Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas di dukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan UPTD kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 650 orang pada tahun 2024. Jumlah tenaga kesehatan ini meningkat dari Tahun 2020 yang hanya 542 orang.

Tabel 2.1
Sumber daya Manusia Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin (L/P)	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1.	Kepala Dinas	L		
2.	Sekretariat			
	➤ Sekretaris Dinas	L	S2 Teknik Sipil	Pembina Tk. I (IV/b)
	➤ Kasubbag Umum & Kepegawaian	L	S2 Kesehatan Masyarakat	Penata (III/c)
	➤ Kasubbag Keuangan	L		
	➤ Kasubbag Program	L	D-III Keperawatan	Penata Muda (III-a)
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat			
	➤ Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	P	S2 Manjemen	Pembina (IV/a)
	➤ Kepala Seksi Kesehatan Dan Gizi Masyarakat	P	S1 Keperawatan	Penata Muda Tk.I (III/b)
	➤ Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	L	D-III Keperawatan	Penata (III/c)
4.	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit			
	➤ Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	P	S1 Keperawatan	Penata Tk. I (III/d)
	➤ Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi	L	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata (III/c)
	➤ Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa	P	S2 Kesehatan Masyarakat	Pembina (IV/a)
5.	Bidang Pelayanan Kesehatan			
	➤ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	L	S2 Manjemen	Penata (III/c)
	➤ Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	P	S1 Keperawatan	Penata Tk. I (III/d)

	➤ Kepala Seksi Fasilitas, Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	L	S2 Manajemen	Penata (III/c)
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan			
	➤ Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	P	S2 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I (III/d)
	➤ Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Pkrt	P	S1 Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I (III/d)
	➤ Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	L	S2 Kesehatan Masyarakat	Penata (III/c)

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Tenaga Medis

No	Uraian	Jumlah / Kondisi Tahun 2024	Rasio
1	Dokter Umum	33	33.93
2	Dokter Spesialis (Jiwa, Bedah, Obgin)	3	3.08
3	Dokter Gigi	8	8.23
4	Tenaga Perawat	217	223.13
5	Tenaga Bidan	144	148.07
6	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	38	39.07
7	Apoteker	4	4.11
8	Asisten Apoteker	17	17.48
9	Nutrisionis	9	9.25
10	Pranata Laboratorium Kesehatan	10	10.28
11	Sanitarian	4	4.11
12	Terapis Gigi dan Mulut	14	14.40
13	Perekam Medis	3	3.08
14	Fisioterapis	5	5.14
15	Kesehatan Lingkungan	2	2.06
16	Nutrisionis	9	9.25

** Ratio per 100.000 penduduk*

Tabel 2.3
Data Pusat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Nias Barat Sampai Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Posyandu	Pos Kesehatan Desa
1.	Lahomi	1	-	3	-	20	4
2.	Sirombu	2	1	4	2	34	8
3.	Mandrehe Barat	1	-	3	-	20	5
4.	Moro'o	2	1	5	-	17	7
5.	Mandrehe	-	1	7	2	58	7
6.	Mandrehe Utara	1	-	2	-	18	6
7	Lolofitu Moi	1	1	4	-	22	5
8.	Ulu Moro'o	1	-	1	-	13	4
JUMLAH [UNIT]		9	4	29	4	202	46

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Barat Sampai Tahun 2024

No	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Sarjana Teknis Kefarmasian (Apoteker dan TTK/Asisten Apoteker)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Nutrisi Gizi
1	Pkm Lahomi	3	-	1	26	25	3	6	-
2	Pkm Sirombu	3	-	1	41	33	3	7	-
3	Pkm Mandrehe Barat	2	-	1	9	8	1	4	-
4	Pkm Moro'o	2	-	1	7	9	1	2	-

5	Pkm Mandrehe	3	-	-	19	25	1	5	2
6	Pkm Mandrehe Utara	2	-	1	27	21	4	3	1
7	Pkm Lolofitu Moi	2	-	-	15	30	4	4	1
8	Pkm Ulu Moro'o	2	-	1	10	9	1	2	-
9	Pkm Hilifadolo	2	-	-	10	13	3	2	1
10	Pkm Sionobanua	1	-	-	3	8	1	-	-
11	Pkm Lahusa	1	-	1	5	11	1	2	1
12	Pkm Hinako	1	-	-	7	13	1	1	-
13	Pkm Ambukha	1	-	1	11	15	1	2	2
14	RSUD Pratama Nias barat	4	3	-	14	35	1	1	1
15	RSUD Pratama Lologolu	4	-	-	4	3	1	-	-
Jumlah		33	3	8	208	258	27	41	9

Kebutuhan tenaga medis khususnya tenaga dokter spesialis yang kondisi pada saat ini berjumlah 3 orang (obgin, penyakit dalam dan jiwa) dan masih diperlukan dokter spesialis yang lain untuk memenuhi kebutuhan didalam pelayanan terutam di tingkat pelayanan Rumah sakit demi menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat, keadaan Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor Dinas Kesehatan	Unit	1	Baik	-	-
2	Rumah Sakit Pratama	Unit	2	Baik	-	-
3	Jumlah Puskesmas	Unit	13	Baik	-	-
	Puskesmas Rawat Inap	Unit	4	Baik	-	-
	Puskesmas Rawat Jalan	Unit	9	Baik	-	-
4	Puskesmas Pembantu	Unit	29	Baik	-	-
5	Klinik Pratama	Unit	4	Baik	-	-
6	Toko Obat	Unit	25	Baik	-	-
7	Ambulans	Unit	17	Baik	-	-
8	Apotek	Unit	9	Baik	-	-
9	Kendaraan Operasional	Unit	2	Baik	-	-
10	Mobil Operasional Farmasi	Unit	2	Baik	-	-
11	Kendaraan Roda Dua	Unit	87	Baik	-	-
12	Pengadaan Pusling	Unit	0	Baik	-	-
13	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Unit	1	Baik	-	-

2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2020-2024

No	Bidang Layanan	Jenis Layanan	Indikator Jenis Layanan	Target SPM	Capaian Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal di Fasyankes milik Pemerintah dan Swasta dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	72,1	53,8	96,3	94,8
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	68,3	47,8	94,6	89,6
3		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	65,51	53,29	84,9	88,5

4		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	57,2	90,16	68,1	84,1
5		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	NA	84,9	26,98	100	93,2
6		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	75,8	74,23	69,4	15,7
7		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	58,5	34,29	79,9	82,8

8		Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	9,5	9,49	100	102,1
9		Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	94,3	94,25	67	45,4
10		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	NA	NA	81,4	78,7
11		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	NA	NA	50,9	71,4

		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	NA	NA	NA	67,1	21,8
--	--	---	--	------	----	----	----	------	------

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah																	
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata – rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Perangkat Daerah																	
Bidang Urusan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	18.225.329.493	27.021.937.500	N/A	N/A	N/A	17.887.847.572	26.276.916.706	N/A	N/A	N/A	98%	97%		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	N/A	N/A	N/A	38.104.056.818	36.722.268.052	N/A	N/A	N/A	35.944.289.005	31.394.853.876	N/A	N/A	N/A	94%	85%		

Kesehatan Masyarakat																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	N/A	N/A	N/A	76.300.000	1.516.903.000	N/A	N/A	N/A	76.268.359	1.052.869.252	N/A	N/A	N/A	100%	69%		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	N/A	N/A	N/A	33.700.000	361.523.000	N/A	N/A	N/A	33.700.000	302.174.092	N/A	N/A	N/A	100%	84%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	N/A	N/A	N/A	384.218.500	43.921.000	N/A	N/A	N/A	384.218.500	40.921.000	N/A	N/A	N/A	100%	93%		
UPTD PUSKESMAS	N/A	N/A	N/A	13.392.831.000	17.111.548.000	N/A	N/A	N/A	12.490.477.052	15.738.557.551	N/A	N/A	N/A	93%	92%		
RUMAH SAKIT	N/A	N/A	N/A	788.500.000	661.847.522	N/A	N/A	N/A	748.855.808	609.758.779	N/A	N/A	N/A	95%	92%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat adalah 105 Desa se-Kabupaten Nias Barat, dimana pelayanan yang diberikan dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskemas Pembantu dan berupa kunjungan di rumah melalui Program Posyandu Lansia, Posyandu Rutin serta kegiatan pengobatan gratis. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan ditangani oleh tenaga medis terampil yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Yang menjadi mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dalam memberikan pelayanan antara lain: Rumah Sakit Pratama sebanyak 2 unit yang terletak di Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe, Puskesmas sebanyak 13 Unit yang tersebar di 8 Kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak 29 Unit yang tersebar di wilayah kabupaten Nias Barat, dan Klinik Swasta sebanyak 4 Unit yang ada di wilayah Kabupaten Nias Barat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Daerah

Yang menjadi mitra kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat yaitu BPJS Kesehatan.

Tugas utama BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mendaftarkan peserta, memungut dan mengelola iuran, membayarkan manfaat atau biaya pelayanan kesehatan, serta memberikan informasi mengenai program kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup, berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Aspek pelayanan umum dalam Bidang Kesehatan pada pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan, masih ditemukan beberapa kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Dari beberapa hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dan perlu untuk menjadi perhatian, sebagaiberikut:

- a. Pendistribusian Tenaga Medis tidak merata
- b. Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan
- c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat
- d. Rendahnya penanganan terhadap penyakit menular dan penayakit tidak menular
- e. Masih adanya kematian Bayi dan kematian Ibu
- f. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan dasar sesuai dengan PMK 43 Tahun 2019
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersalin difasilitas kesehatan
- h. Rendahnya pola asuh Ibu dalam memberikan makanan bergizi pada Bayi serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari ibu mengenai imunisasi dasar Bayi
- i. Prevalensi stunting dan Balita gizi buruk masih tinggi
- j. Masih terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan
- k. Masih kurangnya sarana dan prasarana dipelayanan kesehatan.

2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias barat Tahun 2025-2029 antara lain:

Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tahun 2025-2029 adalah :

- a. Penerapan SPM
- b. Angka Kematian Ibu dan Bayi
- c. Stunting
- d. Cakupan imunisasi bayi lengkap
- e. Tuberkulosis

Tabel 2.8

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu strategis pd
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penambahan SDM yang berkualitas	Rendahnya capaian SPM	Fasilitas kesehatan kurang memadai	Belum tercapainya target 100%	Keterbatasan anggaran dan SDM	Keterbatasan fasilitas kesehatan penunjang	Penerapan SPM

						serta sumber daya manusia	
2.	Penambahan Fasilitas Kesehatan	Masih adanya kematian ibu dan bayi	Keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, tingkat pendidikan	Hambatan akses layanan kesehatan berkualitas	Rendahnya pengetahuan masyarakat	Keterbatasan ekonomi dan infrastruktur	Angka Kematian Ibu dan Bayi
3.	Penambahan pelayanan kesehatan	Capaian rendah	Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh yang tepat.	Kurangnya asupan gizi	Kekurangan gizi kronis	Gizi buruk, minimnya layanan kesehatan dan sanitasi	Stunting
4.	Melakukan penyuluhan kesehatan	Masih adanya yang belum terimunisasi lengkap		Faktor sosial ekonomi	usia ibu, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, tingkat	Kurangnya kesadaran akan pentingnya imunisasi	Cakupan imunisasi bayi lengkap

					pengetahuan ibu dan urutan kelahiran anak		
5.	Melakukan penyuluhan kesehatan	Masih rendahnya capaian pengobatan TB		Faktor sosial ekonomi	adanya kesenjangan antara estimasi dan notifikasi kasus yang disebabkan oleh belum semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melaporkan kasus ke	Kurangnya kesadaran dari masyarakat (rasa malu untuk berobat)	Tuberkulosis

					Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), serta keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan tantangan dalam pengobatan dan pelacakan pasien di daerah terpencil		
--	--	--	--	--	---	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 2025-2029

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat mendukung Visi **“MEWUJUDKAN NIAS BARAT CERAH”**, dengan mengacu pada misi daerah, khususnya pada misi IV yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani”, berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut:

“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif dan Cakupan jaminan kesehatan”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan Kesehatan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 pada Renstra, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Nias Barat.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan yang ada saat ini, berikut rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nias Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan											
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif - Peningkatan cakupan jaminan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif dan Cakupan jaminan kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	87,7	122	109	97	86	77	77	
			Prevalensi Stunting (%)	34,4	26,4	25,07	23,74	22,41	21,08	19,75	
			Tuberkulosis (treatment coverage) (%) (%)	90	91,00	91,43	91,87	92,30	92,74	93,17	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	69,31	90	90,48	90,96	91,44	91,92	92,40	
			Persentase Cakupan Kepesertaan JKN (UHC) (%)	98,78	100	100	100	100	100	100	
		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Jumlah Kematian Balita (Orang)	12	10	8	6	6	6	6	
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	36	46	55	61	70	70	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	77	80	85	90	93	95	96	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	5	13,25	21,5	29,75	38	38	
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (Persentase)	-	20	20	25	40	65	80	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, sumber daya yang ada pada Dinas Kesehatan digunakan untuk mendukung upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan disusun untuk memberikan landasan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun mendatang, serta memastikan kontribusi nyata sektor Kesehatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Memperhatikan perkembangan dan tantangan saat ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adalah:

Tantangan saat ini yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat adalah :

- a. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- b. Penurunan Angka Stunting
- c. Penguatan Pelayanan Kesehatan
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- e. Pembiayaan Kesehatan
- f. Penyakit menular dan tidak menular
- g. Fasilitasi Kesehatan Rujukan

Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat tahun 2025-2029 adalah :

- a. Penerapan SPM
- b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- c. Penurunan Stunting
- d. Cakupan imunisasi bayi lengkap
- e. Tuberkulosis

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi serta perkuatan fondasi sistem layanan kesehatan	Peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi	Pemantapan program pencegahan dan inovasi layanan	Evaluasi akhir renstra dan pembangunan sistem berkelanjutan

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Resntra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
1. 2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif. Peningkatan cakupan jaminan Kesehatan.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standart	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standart	
		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	
		Pengkinian data kepesertaan seluruh masyarakat dalam BPJS Kesehatan (Jamkesnas dan Jamkesda) secara berkelanjutan	Pengkinian data kepesertaan seluruh masyarakat dalam BPJS Kesehatan (Jamkesnas dan Jamkesda) secara berkelanjutan	
		Peningkatan Akses pelayanan kesehatan ibu (ANC, PNC, Ponek, dan Poned)	Peningkatan Akses pelayanan kesehatan ibu (ANC, PNC, Ponek, dan Poned)	
		Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih	Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih	
		Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (studi	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (studi	

		lanjut, diklat, bimtek, dsb.) serta insentif bagi tenaga kesehatan sesuai regulasi yang mengatur	lanjut, diklat, bimtek, dsb.) serta insentif bagi tenaga kesehatan sesuai regulasi yang mengatur	
		• Optimalisasi penanganan kasus kematian ibu didukung oleh stakeholder terkait	• Optimalisasi penanganan kasus kematian ibu didukung oleh stakeholder terkait	
		• Mitigasi kematian bayi dalam mendukung generasi emas 2045	• Mitigasi kematian bayi dalam mendukung generasi emas 2045	
		• Peningkatan Perbaikan gizi ibu hamil, bayi dan balita	• Peningkatan Perbaikan gizi ibu hamil, bayi dan balita	
		• Peningkatan cakupan imunisasi ibu hamil, pemberian TTD, dan imunisasi dasar lengkap bagi bayi	• Peningkatan cakupan imunisasi ibu hamil, pemberian TTD, dan imunisasi dasar lengkap bagi bayi	
		• Peningkatan promosi dan edukasi kesehatan perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	• Peningkatan promosi dan edukasi kesehatan perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	
		• Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan	• Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan	

		tumbuh kembang	tumbuh kembang	
		• Penguatan Layanan Deteksi Dini dan Skrining TB	• Penguatan Layanan Deteksi Dini dan Skrining TB	
		• Penguatan implementasi program DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) melalui kader atau petugas kesehatan	• Penguatan implementasi program DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) melalui kader atau petugas kesehatan	
		• Pelibatan keluarga dan kader sebagai pengawas minum obat (PMO).	• Pelibatan keluarga dan kader sebagai pengawas minum obat (PMO).	
		• Penyediaan dukungan non-tunai (transportasi, nutrisi dasar) bagi pasien TB.	• Penyediaan dukungan non-tunai (transportasi, nutrisi dasar) bagi pasien TB.	
		• Evaluasi berkala terhadap hasil pengobatan	• Evaluasi berkala terhadap hasil pengobatan	
		• Penyediaan logistik obat anti-TB sesuai standar nasional	• Penyediaan logistik obat anti-TB sesuai standar nasional	
		• Promosi tentang Pentingnya ASI eksklusif	• Promosi tentang Pentingnya ASI eksklusif	
		• Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Rumah Sakit	• Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Rumah Sakit	

		• Peningkatan Mutu Pelayanan Berbasis Standar Akreditasi	• Peningkatan Mutu Pelayanan Berbasis Standar Akreditasi	
		• Penguatan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	• Penguatan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	
		• Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Akreditasi	• Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Akreditasi	
		• Evaluasi dan Reakreditasi Berkelanjutan	• Evaluasi dan Reakreditasi Berkelanjutan	
		• Penguatan Tata Kelola Puskesmas	• Penguatan Tata Kelola Puskesmas	
		• Peningkatan Kapasitas SDM	• Peningkatan Kapasitas SDM	
		• Penguatan Sistem Informasi dan Pelaporan	• Penguatan Sistem Informasi dan Pelaporan	
		• Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	• Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	
		• Pendampingan dan Supervisi Berkelanjutan	• Pendampingan dan Supervisi Berkelanjutan	
		• Evaluasi dan Reakreditasi Berkelanjutan	• Evaluasi dan Reakreditasi Berkelanjutan	
		• Peningkatan cakupan kepesertaan JKN melalui integrasi data dan pendekatan proaktif oleh	• Peningkatan cakupan kepesertaan JKN melalui integrasi data dan pendekatan proaktif oleh	

		Puskesmas	Puskesmas	
		• Penyesuaian dan penyusunan kebijakan daerah untuk memperkuat pembiayaan, layanan, dan integrasi lintas sektor dalam mendukung akreditasi dan UHC	• Penyesuaian dan penyusunan kebijakan daerah untuk memperkuat pembiayaan, layanan, dan integrasi lintas sektor dalam mendukung akreditasi dan UHC	

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai hasil penjabaran dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang bersumber dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan							
- Peningkatan cakupan jaminan kesehatan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang inklusif dan Cakupan jaminan kesehatan				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Prevalensi Stunting (%)		
					Tuberkulosis (treatment coverage) (%) (%)		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
					Persentase Cakupan Kepesertaan JKN (UHC) (%)		
		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup			Jumlah Kematian Balita (Orang)		
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Jumlah Layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	

					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Cakupan penemuan kasus TB		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	

					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	

					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Prevalensi Obesitas diatas 18 tahun		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase lanjut usia yang mandiri		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
				Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Cakupan Pengawasan Sarana Kefarmasian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Cakupan Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar		1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
						1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
						1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Cakupan Pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
						1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	

			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Advokasi dan pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Cakupan Penyelenggaraan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Cakupan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (Persentase)		
			Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	

					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

				Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

[illegible]

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Cakupan penemuan kasus TB		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	

					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	

					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Persentase penderita depresi pada penduduk >= 15 tahun yang mendapat layanan		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Prevalensi Obesitas diatas 18 tahun		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Persentase lanjut usia yang mandiri		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
				Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Advokasi dan pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Cakupan Penyelenggaraan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Cakupan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				134.410.279.733, 97		112.937.719.633, 28		112.450.680.395, 65		111.931.456.597, 01		121.201.972.573, 15		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.363.194.600,0 0		38.238.089.336,1 7		38.304.281.556,2 1		38.370.607.279,7 4		39.514.508.416,0 3		
Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah (Nilai)	0	62	40.363.194.600,0 0	65	38.238.089.336,1 7	68	38.304.281.556,2 1	72	38.370.607.279,7 4	75	39.514.508.416,0 3	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00			
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				36.045.000.000,00		34.545.031.736,17		34.638.102.956,21		34.687.428.679,74		35.856.208.816,03			
Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,0	0	36.045.000.000,00	0	34.545.031.736,17	0	34.638.102.956,21	0	34.687.428.679,74	0	35.856.208.816,03			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	564	564				564				564				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,0	0				0				0				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,0	0				0				0				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,0	0				0				0				
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1				1				1				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13				
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				36.000.000.000,00		34.500.031.736,17		34.593.102.956,21		34.642.428.679,74		35.811.208.816,03			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	564	564	36.000.000.000,00	564	34.500.031.736,17	564	34.593.102.956,21	564	34.642.428.679,74	564	35.811.208.816,03			
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00		
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

Perangkat Daerah														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrtasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0,0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0,0	0				0				0			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0,0	0				0				0			

	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				128.000.000,00		145.000.000,00		157.000.000,00		174.000.000,00		188.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,0	0	128.000.000,00	0	145.000.000,00	0	157.000.000,00	0	174.000.000,00	0	188.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	17		20		22		25		27			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi				35.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasii Kepegawaian (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	1	33.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	17	50.000.000,00	20	75.000.000,00	22	80.000.000,00	25	90.000.000,00	27	100.000.000,00		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				901.868.600,00		901.868.600,00		901.868.600,00		901.868.600,00		901.868.600,00		
Jumlah Layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	12	901.868.600,00	12	901.868.600,00	12	901.868.600,00	12	901.868.600,00	12	901.868.600,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	25		25		25		25					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5		5		5		5					

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	33		33		33		33		33			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	20		20		20		20					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,0	0		0		0		0					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1					
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				374.820.600,00		374.820.600,00		374.820.600,00		374.820.600,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	33	374.820.600,00	33	374.820.600,00	33	374.820.600,00	33	374.820.600,00	33	374.820.600,00		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	199.838.000,00	5	199.838.000,00	5	199.838.000,00	5	199.838.000,00	5	199.838.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.002.000,00		44.002.000,00		44.002.000,00		44.002.000,00		44.002.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	25	44.002.000,00	25	44.002.000,00	25	44.002.000,00	25	44.002.000,00	25	44.002.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan				36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		

dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00	12	36.000.000,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				162.408.000,00		162.408.000,00		162.408.000,00		162.408.000,00		162.408.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12	162.408.000,00	12	162.408.000,00	12	162.408.000,00	12	162.408.000,00	12	162.408.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00		28.800.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	1	28.800.000,00	1	28.800.000,00	1	28.800.000,00	1	28.800.000,00	1	28.800.000,00		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.993.326.000,00		1.351.189.000,00		1.312.310.000,00		1.312.310.000,00		1.273.431.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	8	1.993.326.000,00	8	1.351.189.000,00	8	1.312.310.000,00	8	1.312.310.000,00	8	1.273.431.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	22		22		22		22		22			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	53		53		53		53		53			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				642.137.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	22	642.137.000,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				155.516.000,00		155.516.000,00		116.637.000,00		116.637.000,00		77.758.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	155.516.000,00	1	155.516.000,00	1	116.637.000,00	1	116.637.000,00	1	77.758.000,00		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.235.000,00		140.235.000,00		140.235.000,00		140.235.000,00		140.235.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	140.235.000,00	5	140.235.000,00	5	140.235.000,00	5	140.235.000,00	5	140.235.000,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.600.000,00		55.600.000,00		55.600.000,00		55.600.000,00		55.600.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	53	55.600.000,00	53	55.600.000,00	53	55.600.000,00	53	55.600.000,00	53	55.600.000,00		
1.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		199.838.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	199.838.000,00	8	199.838.000,00	8	199.838.000,00	8	199.838.000,00	8	199.838.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00		
Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	840.000.000,00	1	840.000.000,00	1	840.000.000,00	1	840.000.000,00	1	840.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	1		1		1		1		1			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.02.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				90.382.085.133,9 ₇		71.227.591.009,6 ₉		70.678.349.262,4 ₈		70.076.777.328,5 ₇		78.099.525.323,7 ₄		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	87,7	109	90.382.085.133,9 ₇	97	71.227.591.009,6 ₉	86	70.678.349.262,4 ₈	77	70.076.777.328,5 ₇	77	78.099.525.323,7 ₄	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		25,07		23,74		22,41		21,08		19,75			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				70.870.885.133,9 ₇		54.913.766.009,6 ₉		50.384.899.262,4 ₈		49.521.527.328,5 ₇		55.817.925.323,7 ₄		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	2	67.620.885.133,9 ₇	1	51.653.766.009,6 ₉	3	47.084.899.262,4 ₈	1	46.241.527.328,5 ₇	0	53.707.925.323,7 ₄		
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	0,0	0		0		0		0		0			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	7	7		1		7		0		0			

	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1		1		2		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	1		1		10		1		1			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	2		2		2		0		0			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	5		1		6		1		2			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	4		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	13	14		1		14		14		14			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				15.000.000.000,0		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1	15.000.000.000,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				2.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	4	2.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	5	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	6	2.000.000.000,00	1	0,00	2	0,00		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				8.491.609.506,24		15.943.572.188,16		15.228.609.206,51		16.483.183.036,68		17.221.875.301,13		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	1	8.491.609.506,24	1	15.943.572.188,16	2	15.228.609.206,51	1	16.483.183.036,68	1	17.221.875.301,13		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				9.491.609.506,24		16.943.572.188,16		16.228.609.206,51		17.483.183.036,68		18.221.875.301,13		

Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	2	9.491.609.506,24	1	16.943.572.188,16	3	16.228.609.206,51	1	17.483.183.036,68	0	18.221.875.301,13		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	7	7	2.100.000.000,00	1	2.100.000.000,00	7	2.100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	10	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				10.437.666.121,49		10.566.621.633,37		8.427.680.849,46		10.175.161.255,21		16.164.174.721,48		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	13	14	10.437.666.121,49	1	10.566.621.633,37	14	8.427.680.849,46	14	10.175.161.255,21	14	16.164.174.721,48		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	0	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				16.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	2	16.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	1	3.250.000.000,00	1	3.260.000.000,00	1	3.300.000.000,00	1	3.280.000.000,00	1	2.110.000.000,00		
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3.050.000.000,00		3.060.000.000,00		3.100.000.000,00		3.080.000.000,00		1.910.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	1	3.050.000.000,00	1	3.060.000.000,00	1	3.100.000.000,00	1	3.080.000.000,00	1	1.910.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				18.561.200.000,0		15.763.825.000,0		19.743.450.000,0		20.005.250.000,0		21.581.600.000,0		
Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.386	7.608	18.561.200.000,0	7.658	15.763.825.000,0	7.708	19.743.450.000,0	7.758	20.005.250.000,0	7.808	21.581.600.000,0		
Cakupan penemuan kasus TB				0		0		0		0		0		
Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	147	18.561.200.000,0	171	15.763.825.000,0	125	19.743.450.000,0	125	20.005.250.000,0	180	21.581.600.000,0		
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	5		0		0		0		0			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	605	27.000		31.000		34.900		36.800		38.365			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.452	5.700		5.970		6.235		6.500		6.633			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.339	4.500		4.508		4.516		4.524		4.532			

	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	356	2.600		2.608		2.616		2.624		2.632			
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	100		100		75		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.453	824		824		824		824		824			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	650	1.761		1.573		1.451		1.322		1.241			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.668	1.684		1.688		1.698		1.708		1.719			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	482	362		324		294		272		255			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2	8		13		18		24		40			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.180	1.411		1.450		1.500		1.550		1.600			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.140	1.160		1.250		1.350		1.400		1.500			

	(Orang)															
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0,0	0				0				0					0
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	8	0				0				0					0
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	13				13				13					13
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	0	0				0				0					1
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	0				0				0					0
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1				1				1					1
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	13	13		13		13		13		13					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0	13				0				0					

	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.140	1.160		1.250		1.350		1.400		1.500			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.621	16.560		16.620		16.680		16.740		16.800			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.180	1.411	300.000.000,00	1.450	300.000.000,00	1.500	350.000.000,00	1.550	350.000.000,00	1.600	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.140	1.160	300.000.000,00	1.250	300.000.000,00	1.350	350.000.000,00	1.400	350.000.000,00	1.500	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.140	1.160	300.000.000,00	1.250	300.000.000,00	1.350	350.000.000,00	1.400	350.000.000,00	1.500	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				550.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		680.000.000,00		700.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.386	7.608	550.000.000,00	7.658	600.000.000,00	7.708	630.000.000,00	7.758	680.000.000,00	7.808	700.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				330.000.000,00		360.000.000,00		390.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.621	16.560	330.000.000,00	16.620	360.000.000,00	16.680	390.000.000,00	16.740	420.000.000,00	16.800	450.000.000,00		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	605	27.000	70.000.000,00	31.000	80.000.000,00	34.900	90.000.000,00	36.800	95.000.000,00	38.365	100.000.000,00		

	Standar (Orang)													
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.452	5.700	70.000.000,00	5.970	80.000.000,00	6.235	90.000.000,00	6.500	95.000.000,00	6.633	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.339	4.500	150.000.000,00	4.508	150.000.000,00	4.516	150.000.000,00	4.524	150.000.000,00	4.532	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	356	2.600	150.000.000,00	2.608	150.000.000,00	2.616	150.000.000,00	2.624	150.000.000,00	2.632	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	100	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	650	1.761	50.000.000,00	1.573	50.000.000,00	1.451	50.000.000,00	1.322	50.000.000,00	1.241	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.668	1.684	30.000.000,00	1.688	30.000.000,00	1.698	30.000.000,00	1.708	30.000.000,00	1.719	30.000.000,00		

1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	13	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				380.000.000,00		0,00		390.000.000,00		0,00		0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0	13	380.000.000,00	0	0,00	13	390.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	100	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	13	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6.804.000.000,00		3.761.625.000,00		6.851.250.000,00		6.853.050.000,00		6.854.400.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	6.804.000.000,00	1	3.761.625.000,00	1	6.851.250.000,00	1	6.853.050.000,00	1	6.854.400.000,00		

1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	75	80.000.000,00	100	300.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				6.000.000.000,00		6.500.000.000,00		6.750.000.000,00		7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	13	6.000.000.000,00	13	6.500.000.000,00	13	6.750.000.000,00	13	7.000.000.000,00	13	7.500.000.000,00		

1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				0,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	482	362	200.000.000,00	324	200.000.000,00	294	200.000.000,00	272	200.000.000,00	255	200.000.000,00		

1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2	8	15.000.000,00	13	15.000.000,00	18	15.000.000,00	24	15.000.000,00	40	15.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.453	824	20.000.000,00	824	20.000.000,00	824	20.000.000,00	824	20.000.000,00	824	20.000.000,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0	147	200.000.000,00	171	250.000.000,00	125	250.000.000,00	125	300.000.000,00	180	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				712.200.000,00		712.200.000,00		712.200.000,00		712.200.000,00		712.200.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12	712.200.000,00	12	712.200.000,00	12	712.200.000,00	12	712.200.000,00	12	712.200.000,00		
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				0		0		0		0		0		
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat				0		0		0		0		0		
Persentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan				0		0		0		0		0		
Prevalensi Obesitas diatas 18 tahun				0		0		0		0		0		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna				0		0		0		0		0		
Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun				0		0		0		0		0		
Persentase lanjut usia yang mandiri				0		0		0		0		0		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		

Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,0	0	550.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				550.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0	15	550.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				0,00		0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	150.000.000,00		
Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan				0		0		0		0		0		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.915.000.000,00		1.814.176.053,32		1.817.316.491,10		1.820.463.262,85		1.874.734.751,96		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	20	1.915.000.000,00	25	1.814.176.053,32	30	1.817.316.491,10	35	1.820.463.262,85	35	1.874.734.751,96	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	10	5		5		5		5		5			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	10	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Cakupan Tenaga Kesehatan yang memiliki STR				0		0		0		0		0		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di				855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		

Wilayah Kabupaten/Kota															
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Persentase Fasilitas Kesehatan dengan jenis tenaga sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	435	100	855.000.000,00	50	855.000.000,00	50	855.000.000,00	50	855.000.000,00	50	855.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1				1				1				
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00			
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	435	100	325.000.000,00	50	325.000.000,00	50	325.000.000,00	50	325.000.000,00	50	325.000.000,00			
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	510.000.000,00	1	510.000.000,00	1	510.000.000,00	1	510.000.000,00	1	510.000.000,00			
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi				0		0		0		0		0			
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar				0		0		0		0		0			

Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar				0		0		0		0		0		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		899.176.053,32		902.316.491,10		905.463.262,85		959.734.751,96		
Cakupan Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	120	100	1.000.000.000,00	100	899.176.053,32	100	902.316.491,10	100	905.463.262,85	100	959.734.751,96		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		899.176.053,32		902.316.491,10		905.463.262,85		959.734.751,96		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	120	100	1.000.000.000,00	100	899.176.053,32	100	902.316.491,10	100	905.463.262,85	100	959.734.751,96		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				910.000.000,00		862.088.881,73		853.581.204,65		865.076.537,44		890.866.122,34		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	0	74,4	910.000.000,00	76,3	862.088.881,73	78,0	853.581.204,65	78,4	865.076.537,44	78,4	890.866.122,34	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		
Cakupan Pengawasan Sarana Kefarmasian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	35	55	160.000.000,00	56	165.000.000,00	57	170.000.000,00	58	175.000.000,00	60	180.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,				160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		

Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	35	55	160.000.000,00	56	165.000.000,00	57	170.000.000,00	58	175.000.000,00	60	180.000.000,00		
1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Capaian Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				430.000.000,00		317.088.881,73		238.581.204,65		205.076.537,44		180.866.122,34		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	24	52	430.000.000,00	54	317.088.881,73	56	238.581.204,65	58	205.076.537,44	60	180.866.122,34		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				430.000.000,00		317.088.881,73		238.581.204,65		205.076.537,44		180.866.122,34		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	24	52	430.000.000,00	54	317.088.881,73	56	238.581.204,65	58	205.076.537,44	60	180.866.122,34		
Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar				0		0		0		0		0		
Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu				0		0		0		0		0		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		
Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	92	98	75.000.000,00	104	75.000.000,00	110	100.000.000,00	115	100.000.000,00	120	105.000.000,00		

1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	92	98	75.000.000,00	104	75.000.000,00	110	100.000.000,00	115	100.000.000,00	120	105.000.000,00		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				55.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	20	55.000.000,00	25	100.000.000,00	30	110.000.000,00	35	120.000.000,00	40	130.000.000,00		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				55.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	20	55.000.000,00	25	100.000.000,00	30	110.000.000,00	35	120.000.000,00	40	130.000.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				190.000.000,00		205.000.000,00		235.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		

Cakupan Pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	88	105	190.000.000,00	110	205.000.000,00	115	235.000.000,00	120	265.000.000,00	125	295.000.000,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				190.000.000,00		205.000.000,00		235.000.000,00		265.000.000,00		295.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	88	105	190.000.000,00	110	205.000.000,00	115	235.000.000,00	120	265.000.000,00	125	295.000.000,00		
Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan				0		0		0		0		0		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				840.000.000,00		795.774.352,37		797.151.881,21		798.532.188,41		822.337.959,08		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	28,67	40	840.000.000,00	45	795.774.352,37	50	797.151.881,21	55	798.532.188,41	60	822.337.959,08	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				340.000.000,00		351.000.000,00		363.100.000,00		376.410.000,00		391.051.000,00		
Persentase Advokasi dan pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	340.000.000,00	1	351.000.000,00	1	363.100.000,00	1	376.410.000,00	1	391.051.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				340.000.000,00		351.000.000,00		363.100.000,00		376.410.000,00		391.051.000,00		

Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	340.000.000,00	1	351.000.000,00	1	363.100.000,00	1	376.410.000,00	1	391.051.000,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Cakupan Penyelenggaraan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	20		25		40		65		80			
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	40	100.000.000,00	65	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		94.774.352,37		84.051.881,21		72.122.188,41		81.286.959,08		
Cakupan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	94.774.352,37	1	84.051.881,21	1	72.122.188,41	1	81.286.959,08		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				150.000.000,00		94.774.352,37		84.051.881,21		72.122.188,41		81.286.959,08		

Masyarakat (UKBM)														
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	94.774.352,37	1	84.051.881,21	1	72.122.188,41	1	81.286.959,08		

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	

			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	87,7	122	109	97	86	77	77	
3.	Prevalensi Stunting	%	34,4	26,4	25,07	23,74	22,41	21,08	19,75	
4.	Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	90	91,00	91,43	91,87	92,30	92,74	93,17	
5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	69,31	90	90,48	90,96	91,44	91,92	92,40	
6.	Persentase Cakupan Kepesertaan JKN (UHC)	%	98,78	100	100	100	100	100	100	
7.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persentase	-	20	20	25	40	65	80	
8.	Jumlah Kematian Balita	Orang	12	10	8	6	6	6	6	
9.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	36	46	55	61	70	70	
10.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	77	80	85	90	93	95	96	
11.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	5	13,25	21,5	29,75	38	38	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	51,98	52,09	52,19	52,29	52,40	52,50	52,61	
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	88,53	88,71	88,88	89,06	89,24	89,42	89,59	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	89,56	89,75	89,93	90,11	90,29	90,47	90,66	
5.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	94,82	95,02	95,21	95,40	95,59	95,78	95,97	
6.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	78,69	78,86	79,02	79,18	79,34	79,50	79,67	
7.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	21,76	21,81	21,85	21,90	21,94	21,99	22,03	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	84,08	84,25	84,42	84,59	84,76	84,93	85,10	
9.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	1,92	1,92	1,93	1,93	1,94	1,94	1,95	
10.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	-	45,50	45,59	45,68	45,77	45,86	45,95	
11.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	102,13	5	13,26	21,15	29,75	38	38	

12.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	%	0	0	50	50	50	50	50	
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	77,19	77,35	77,50	77,65	77,80	77,96	78,11	
14.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Rasio	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	
15.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		%	71,38	71,53	71,68	71,83	71,98	72,13	72,28	

Tabel 4.6

Formula Perhitungan Indikator

No	Indikator	Satuan	Formula
	Indikator Tujuan		
1	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Kasus X Proyeksi sasaran}}{100.000 \text{ kelahiran hidup}}$
2	Prevalensi Stunting (%)	%	(Jumlah balita stunting : Jumlah seluruh balita dalam populasi) x 100%
3	Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	(Jumlah kasus TBC baru dan diobati) / (Estimasi total kasus TBC insiden) x 100%
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	%	(Jumlah Kasus yang Sembuh) / (Total Kasus Terdaftar) x 100%
5	Persentase Cakupan Kepesertaan JKN (UHC) (%)	%	(Jumlah Peserta JKN / Jumlah Penduduk) x 100%
	Indikator Inerja Kunci		
1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	(yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : jmlh anak usia Pendidikan dasar)x 100%
2	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	(yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir : jmlh bayi baru lahir)x 100%
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	(yang mendapatkan pelayanan persalinan : jmlh ibu bersalin)x 100%
4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	(yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil : jmlh ibu hamil)x 100%
5	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	(yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar : jmlh ODGJ berat)x 100%
6	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	(yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar : jmlh orang dengan resiko terinfeksi HIV)x 100%
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	(jmlh yang mendapatkan

	sesuai standar		$\frac{\text{pelayanan : Jlh total Balita}}{100\%}$
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	$\frac{(\text{orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar: jmlh usia 15-59 tahun})}{100\%}$
9	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{(\text{penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: jmlh penderita Diabetes Melitus (DM)})}{100\%}$
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{(\text{penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: jmlh penderita hipertensi})}{100\%}$
11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	$\frac{(\text{RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi: jmlh RS Rujukan})}{100\%}$
12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	$\frac{(\text{usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar: jmlh usia 60 tahun ke atas})}{100\%}$
13	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1:1000 dari jlh penduduk
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	$\frac{(\text{orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar : jmlh orang terduga TBC})}{100\%}$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2025–2029 berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta perubahan-perubahan aturan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah maka di susunlah Renstra Tahun 2025–2029 yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat 5 (lima) tahun kedepan, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2025–2029

Renstra menjabarkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat; Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja Anggaran (RKA); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan disusunnya Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 diharapkan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan, hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.